

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
PEMERINTAH DESA DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
DANA DESA**

(Studi Empiris Pada Desa se-Kabupaten Pringsewu)

(Skripsi)

Oleh:

**Nabella Ariantika
NPM 1861031002**



**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRACT

**THE INFLUENCE OF VILLAGE GOVERNMENT HUMAN RESOURCE
COMPETENCE AND THE UTILIZATION OF INFORMATION
TECHNOLOGY ON THE ACCOUNTABILITY OF VILLAGE FUND
MANAGEMENT
(Empirical Study in Villages Throughout Pringsewu Regency)**

By

Nabella Ariantika

This study aims to analyze the influence of village government human resource competence and the utilization of information technology on the accountability of village fund management in Pringsewu Regency. This research uses a quantitative method with a descriptive paradigm. The data sources used are primary data obtained through the distribution of questionnaires. The population in this study is the village government in Pringsewu Regency, with a total sample of 91 respondents selected using purposive random sampling. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that village government human resource competence and the utilization of information technology have a positive influence on the accountability of village fund management.

Keywords: Village Government Human Resource Competence, Utilization of Information Technology, and Accountability.

ABSTRAK

PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA PEMERINTAH DESA DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Empiris Pada Desa se-Kabupaten Pringsewu)

Oleh

Nabella Ariantika

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh kompetensi sumber daya manusia pemerintah desa dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Pringsewu. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan paradigma deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui pembagian kuisioner. Populasi penelitian ini adalah pemerintah desa di Kabupaten Pringsewu, dengan total sampel 91 sampel yang dipilih menggunakan purposive random sampling. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia pemerintah desa dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kata Kunci: Kompetensi Sumber Daya Manusia Pemerintah Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Akuntabilitas.

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
PEMERINTAH DESA DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
DANA DESA
(Studi Empiris Pada Desa se-Kabupaten Pringsewu)**

Oleh:

Nabella Ariantika

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA AKUNTANSI**

Pada

**Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER
DAYA MANUSIA PEMERINTAH DESA
DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI TERHADAP
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
DANA DESA**

Judul Skripsi

Nama Mahasiswa

Nabella Ariantika

Nomor Pokok Mahasiswa

1861031002

Jurusan

Akuntansi

Fakultas

Ekonomi dan Bisnis



1. Komisi Pembimbing

Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Akt., CA
NIP. 19740312 200112 1003

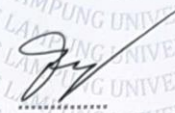
2. Ketua Jurusan

Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt., CA., C.M.A.
NIP. 19700801 199512 2001

MENGESAHKAN

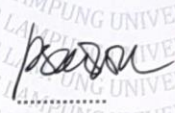
1. Tim Penguji
Ketua

Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Akt., CA



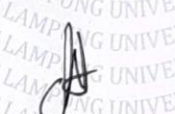
Penguji Utama I

Pigo Nauli, S.E., M.Sc., Ph.D



Penguji II

Sari Indah Oktanti Sembiring, S.E., M.S., Ak



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Naironi, S.E., M.Si.
NIP. 19660621 199003 1003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **05 Juni 2025**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Nabella Ariantika

NPM : 1861031002

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Pemerintah Desa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa” adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian penulisan pemikiran dan pendapat penulis lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya. Apabila ditemukan dikemudia hadri terbukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 16 Juni 2025
Yang menyatakan



Nabella Ariantika
NPM 1861031002

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Waringinsari pada tanggal 05 Oktober 2000 dengan nama lengkap Nabella Ariantika sebagai anak ketiga dari 3 bersaudara pasangan Bapak Hadi Wacono dan Ibu Sarmiyati. Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak di Taman Kanak-Kanak Pertiwi pada tahun 2006. Dilanjutkan Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 03 Sukoharjo 1 pada tahun 2012. Kemudian penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 01 Sukoharjo pada tahun 2015, dan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 01 Sukoharjo pada tahun 2018. Selanjutnya pada tahun 2018 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung melalui jalur prestasi.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbilalamin

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nyasehingga dapat terselesaikannya skripsi ini. Shalawat beriring salam selaludisanjung agungkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam. **Kupersembahkan skripsi ini sebagai tanda cinta dan kasih sayang yang tulus kepada:**

Diriku sendiri.

Aku yang sudah berjuang selama bertahun-tahun lamanya menyelesaikan skripsi ini dengan berbagai usaha yang dilakukan. Terima kasih sudah selalu berusahasekuat tenaga dalam segala kondisi dan situasi.

Kedua Orang Tuaku tercinta, Ayahanda Hadi Wacono dan Ibunda Sarmiyati

yang telah memberikan segala cinta, kasih sayang, nasihat, doa, dukungan, dan perjuangan yang tiada hentinya untuk kesuksesan penulis. Terimakasih yang tiada tara kepada ayah dan ibu karena telah merawat, membesarkan, dan mendidik penulis tanpa lelah.

Kakak-kakakku tersayang Eko Wicaksono dan Wuri Andriani

yang telah memberikan dukungan, nasihat, doa serta motivasi semangat dalam proses mencapai impianku.

Seluruh keluarga, sahabat, dan teman-teman seperjuangan

yang telah memberikan dukungan, nasihat, dan motivasi tiada henti dalam suka maupun duka.

Almamaterku tercinta, Universitas Lampung

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.”

(Ar-Ra’d: 11)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(Al-Baqarah: 286)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”

(Al-Insyirah: 5-6)

SANWACANA

Bismillahirrohmaanirrahiim,

Alhamdulillahirabbilalamin, puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Pemerintah Desa Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Penulis mengucapkan terimakasih atas bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak dalam proses penyusunan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt. CA., C.M.A. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Retno Yuni Nur Susilowati, S.E., M.Sc. Akt. CA. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Akt., CA. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan, motivasi, saran dan kritik, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Pigo Nauli, S.E., M.Sc., Ph.D. selaku Dosen Penguji Utama yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun dalam penyempurnaan skripsi ini.
6. Ibu Sari Indah Oktanti Sembiring, S.E., M.S., Ak selaku Dosen Penguji Pendamping yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun dalam penyempurnaan skripsi ini.

7. Ibu Widya Rizki Eka Putri, S.E., M.S.Ak. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan saran dan nasihat kepadapenulis selama menjadi mahasiswa.
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampungyang telah memberikan ilmu, wawasan, dan pengetahuan berharga bagi penulis selama proses perkuliahan berlangsung.
9. Seluruh karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan dan pelayanan yang baik selama proses perkuliahan maupun penyusunan skripsi ini.
10. Kedua orangtuaku tercinta, Bapak Hadi Wacono dan Ibu Sarmiyati. Terima kasih atas kasih sayang, doa, dukungan, perhatian, dan segala yang telah kalian berikan kepada penulis. Semoga kelak penulis dapatmenjadi kebanggaan keluarga.
11. Saudara-saudaraku tersayang, Eko Wicaksono dan Wuri Andriani.Terima kasih telah memberikan kasih sayang, dukungan, doa, serta menjadi pemacu semangatku. Semoga kelak penulis dapat membahagiakan serta membalas kebaikan kalian.
12. Saudara-saudara Iparku, Tria Rosdiana Dewi dan Muhamad Wahendra. Terima kasih telah memberikan kasih sayang, dukungan, doa, serta menjadi pemacu semangatku. Semoga kelak penulis dapat membahagiakan serta membalas kebaikan kalian.
13. Keponakanku tersayang, Naufal Adhyatma Wicaksono yang selalu menghibur, menyemangati, serta mendoakan.
14. Seluruh keluarga besarku yang memberikan semangat, dukungan, bantuan,serta doa.
15. Terimakasih untuk sahabat-sahabatku Vina Kursilawati, Siska Susianti Zebua,dan Ita Utami yang telah kebersamai penulis sejak awal hingga akhir perkuliahan, terimakasih selalu ada serta mewarnai hari-hari perkuliahan dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini. terima kasih atas doa, dukungan, dan banyak hal yang diberikan. Semoga hal baik selalu mengiringi kalian, dimanapun kalian berada nantinya. Semoga kita silahturahmi ini selalu terjaga selamanya.

16. Seluruh teman-teman Akuntansi 2018 yang telah kebersamai, saling mendukung selama proses perkuliahan, dan sukses untuk kalian semua.
17. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Atas bantuan dan dukungannya, penulis mengucapkan terima kasih, semoga mendapat balasan dan berkah dari Allah SWT.
18. Alamamaterku tercinta Universitas Lampung.
19. Last but not least, Terimakasih untuk diriku sendiri yang sudah memilih untuk bangkit dan menyelesaikan apa yang sudah dimulai, Terimakasih untuk kerjasamanya yang luar biasa.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sehingga besar harapan penulis akan kritik dan saran guna menyempurnakan penelitian penelitian selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat Aamiin.

Bandarlampung, 16 Juni 2025

Penulis

Nabella Ariantika

DAFTAR ISI

	Halaman.
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Tinjauan Teoritis	11
2.1.1 Teori <i>Technology Acceptance Model</i> (TAM)	11
2.1.2 Teori <i>Stewardship</i>	12
2.1.3 Akuntabilitas	13
2.1.4 Dana Desa	16
2.1.5 Pemanfaatan Teknologi Informasi	17
2.1.6 Kompetensi Sumber Daya Manusia	18
2.2 Penelitian Terdahulu	19
2.3 Pengembangan Hipotesis	20
2.3.1 Kompetensi Sumber Daya Manusia Pemerintah Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	20
2.3.2 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	21
2.4 Kerangka Berfikir.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	24
3.1 Objek Penelitian	24
3.2 Populasi dan Sampel	24

3.3	Jenis dan Sumber Data	26
3.4	Teknik Pengumpulan Data	26
3.5	Definisi Operasional Variabel	27
3.6	Teknik Analisis Data	29
3.6.1	Statistik Deskriptif	29
3.6.2	Uji Kualitas Data	29
3.6.3	Uji Asumsi Klasik.....	30
3.7	Uji Hipotesis.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		34
4.1	Hasil Penelitian	34
4.1.1	Hasil Distribusi Kuisioner	34
4.1.2	Karakteristik Responden.....	35
4.1.3	Uji Validitas dan Reliabilitas	36
4.1.4	Uji Asumsi Klasik.....	38
4.1.5	Analisis Regresi Linier Berganda	41
4.1.6	Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	41
4.1.7	Uji t (Uji Parsial).....	42
4.2	Pembahasan	43
4.2.1	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Pemerintah Desa berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.....	43
4.2.2	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	44
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		47
5.1	Kesimpulan.....	47
5.2	Keterbatasan Penelitian	47
5.3	Saran.....	48

DAFTAR TABEL

	Halaman.
Tabel 1.1 Alokasi Dana Desa Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2015-2017	7
Tabel 4.1 Distribusi Kuisioner Penelitian	34
Tabel 4.2 Karakteristik Demografi Responden.....	35
Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas.....	36
Tabel 4.4 Hasil Uji Reliabilitas	38
Tabel 4.5 Hasil Uji Normalitas	38
Tabel 4.6 Uji Multikolinieritas.....	39
Tabel 4.7 Uji Heterokedastisitas	39
Tabel 4.8 Uji Autokorelasi.....	40
Tabel 4.9 Analisis Regresi Linier Berganda	41
Tabel 4.10 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	42

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Kerangka Berfikir.....	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan konsekuensi bahwa desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Tujuan utama dari undang-undang desa untuk meningkatkan kemandirian desa melalui program dan kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Undang-undang tersebut telah menggeser pendekatan pembangunan terhadap desa dari objek pembangunan menjadi subjek pembangunan.

Desa menjadi prioritas pembangunan pemerintah yaitu pembangunan dari pinggiran yaitu desa (Arfiansyah, 2023). Tujuan utama dari undang-undang desa untuk meningkatkan kemandirian desa melalui program dan kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Undang-undang tersebut telah menggeser pendekatan pembangunan terhadap desa dari objek pembangunan menjadi subjek pembangunan. Desa menjadi prioritas pembangunan pemerintah sesuai Nawa Cita pemerintah yaitu pembangunan dari pinggiran yaitu desa (Raharja et al., 2020). Maka dari itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

Akuntabilitas merupakan suatu usaha pertanggungjawaban baik secara personal maupun lembaga/instansi pemerintah terhadap wewenang administrasi yang diberikan kepadanya (Asmawati, 2020). Akuntabilitas seringkali juga disebut *accountable* dalam bahasa Inggris, yang artinya adalah “sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan”. Tanggung jawab yang diemban oleh pemerintah

terkait dengan pengelolaan sumber daya yang ada, pelaksanaan dan penyampaian informasi berbagai aktivitas dan kegiatan penggunaan sumber daya tersebut dan melaporkan segala hal yang berkaitan dengan hal tersebut (Mahmudi, 2010). Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*), yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel yang memungkinkan para pemakai laporan keuangan untuk dapat mengakses informasi tentang hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Akuntabilitas diyakini mampu mengubah kondisi pemerintahan yang tidak dapat memberikan pelayanan publik secara baik dan yang menyalahgunakan wewenang menuju suatu tatanan pemerintahan yang demokratis (Riantiarno dan Nur, 2011). Akuntabilitas dalam instansi perlu diperkuat dan lebih dalam mengkaji aspek apa yang diduga akan berpengaruh terhadap akuntabilitas pemerintah.

Menguatnya tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, penciptaan akuntabilitas public harus dilaksanakan dalam akuntansi pemerintahan untuk dapat menciptakan *good governance*. Sehubungan dengan hal tersebut seperangkat peraturan perundangundangan telah digulirkan, salah satunya adalah Intruksi Presiden No.7 Tahun 1999 tanggal 15 juni 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Kinerja Pemerintahan (AKIP), ini merupakan dalam satu upaya untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab (Lumenta, 2016).

Fokus akuntabilitas adalah melihat hubungan kekuasaan antara mereka yang diberikan kedudukan dengan kepercayaan publik dan warga negara. Dari beberapa pandangan diatas maka, akuntabilitas berhubungan dengan kewajiban institusi pemerintahan maupun para aparatur untuk menjawab (*obligation to answer*) semua amanah yang diperoleh dari rakyat, kewenangan dan capaian kinerjanya kepada masyarakat, bukan hanya sekedar penyampaian laporan (*giving an account*), dan untuk membuat kebijakan maupun melakukan aksi yang sesuai

dengan nilai yang berlaku maupun sesuai kebutuhan masyarakat (Jamaluddin, 2017).

Akuntabilitas menjadi kontrol terhadap segala aktivitas aparatur desa dalam mengelola dana desa, sehingga peran mereka sebagai agen menjadi faktor penting dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa. Terwujudnya akuntabilitas pengelolaan dana desa tidak lepas dari kompetensi yang dimilikinya. Kompetensi yang kompeten dapat mendorong aparatur desa dalam memahami tata cara pengelolaan dana desa dengan baik. Kurangnya kompetensi aparatur desa, menyebabkan masalah pada bagian administrasi pengelolaan dana desa yang mengakibatkan terlambatnya pencairan dana desa periode berikutnya.

Maka dapat diartikan jika akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif pemerintah desa kepada masyarakat yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam instansi pemerintahan, penggunaan teknologi informasi merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi, untuk membantu pengolahan data yang lebih cepat, efektif dan efisien.

Berkembangnya teknologi informasi memudahkan seseorang dalam melakukan aktivitas dan pekerjaannya. Pemanfaatan teknologi informasi ini akan meminimalis kesalahan, karena semua aktivitas pengelolaan keuangan akan tercatat secara lebih sistematis dan pada akhirnya akan mampu menyajikan laporan yang berkualitas. Dengan menggunakan teknologi informasi termasuk teknologi komputer dalam pengelolaan keuangan akan meningkatkan proses transaksi dan data lainnya, menghitung secara akurat dan menyusun laporan keuangan tepat waktu. Hal ini akan membantu pemerintah mengatasi volume transaksi yang meningkat setiap tahun.

Pemanfaatan teknologi yang efektif dapat meningkatkan kinerja. Teknologi informasi merupakan suatu teknologi yang di gunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan dan memanipulasi data. Teknologi informasi digunakan dalam suatu organisasi baik swasta maupun pemerintahan untuk mencapai pengelolaan keuangan yang efektif, efisien,

transparan, dan akuntabel. Nurillah (2014) menyimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hal ini sesuai dengan model penerimaan teknologi (*technology acceptance model/TAM*). TAM (*Technology Acceptance Model*) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan kinerja. Kinerja berhubungan dengan pencapaian serangkaian tugas-tugas yang dilaksanakan oleh karyawan atau pegawai didalam organisasi pemerintahan tersebut. Sehingga, semakin tinggi kinerja dan pengetahuan pegawai semakin meningkat pula efektifitas, produktivitas dan kualitas pelayanan instansi tersebut.

Pemanfaatan teknologi informasi ini juga harus didukung oleh tingkat kompetensi sumber daya manusia. Untuk mengelola anggaran dana desa diperlukan sumber daya manusia yang berkompeten dibidangnya (Raharja et al., 2020). Sumber daya manusia merupakan aset organisasi yang sangat vital, sehingga peran dan fungsinya tidak bisa digantikan oleh sumber daya lainnya. Peran SDM dalam perusahaan/organisasi mempunyai arti yang sama pentingnya dengan pekerjaan itu sendiri, sehingga interaksi antara organisasi dan SDM menjadi fokus perhatian pimpinan.

Melihat pentingnya pengembangan kemampuan/kompetensi SDM dalam organisasi, maka perlu adanya program-program yang dikembangkan oleh organisasi itu sendiri dalam meningkatkan kompetensi SDM. Kompetensi dalam hal ini adalah sebagai karakteristik yang mendasari seseorang dan berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya (Syahputra & Jufrizen, 2019). Kompetensi yang dimiliki oleh pengelola dana desa menjadi syarat utama agar akuntabilitas desa bisa berjalan dengan maksimal.

Maka dari itu sumber daya manusia harus dikelola dengan baik sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimal untuk mencapai tujuan organisasi, sumber daya manusia yang baik tentu mencerminkan pribadi yang jujur dan bertanggungjawab atas amanah yang telah diberikan, bukan pribadi yang melakukan kecurangan. Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005 menyebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik,

pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, dan mempermudah penyampaian informasi keuangan ke publik.

Terbatasnya pemanfaatan teknologi informasi dapat menyebabkan rendahnya kualitas layanan ke masyarakat desa sedangkan penggunaan teknologi informasi memiliki keunggulan guna meningkatkan keakuratan dan ketepatan informasi dan mengurangi kesalahan (Aziiz, N. M., dan Prastiti, 2019). Pemanfaatan teknologi informasi ini dinyatakan ampuh menjadi salah satu hal yang mempengaruhi kinerja instansi pemerintah desa dalam mewujudkan akuntabilitas dana desa.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dana desa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2024 terus mengalami peningkatan, akan tetapi pada tahun 2022 sempat mengalami penurunan. Dana desa tahun 2015 yaitu sebesar Rp 20,77 triliun, dan di tahun 2021 yaitu sebesar Rp 72 triliun, kemudian pada tahun 2022 terjadi penurunan menjadi sebesar Rp 68 triliun penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor utama dimana adanya penyesuaian prioritas anggaran akibat dampak *Covid-19* dan juga pada tahun 2022 pasca pandemi merupakan tahun pemulihan sehingga kebutuhan anggaran di sektor-sektor tertentu seperti kesehatan, infrastruktur strategis, dan subsidi energi, dapat menjadi prioritas dibandingkan peningkatan dana desa. Kemudian pada tahun 2023 mengalami peningkatan kembali yaitu sebesar Rp 70 triliun dan pada tahun 2024 sebesar Rp 71 triliun.

Dana desa tersebut diharapkan dapat membiayai penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan, pembinaan kepada masyarakat atau pemberdayaan masyarakat. Secara khusus dana desa diharapkan dapat mengurangi jumlah desa tertinggal, Kabupaten Pringsewu dipilih sebagai objek penelitian karena memiliki karakteristik yang representative untuk mengkaji dinamika pengelolaan dana desa di daerah berkembang. Kabupaten ini terdiri dari 131 desa (pekon) yang tersebar di 9 kecamatan, dengan jumlah penduduk yang cukup padat dan tingkat ketergantungan tinggi terhadap dana desa dalam pembangunan wilayah. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pringsewu, total dana desa yang

dibagikan ke wilayah ini pada tahun 2024 mencapai lebih dari Rp 100 miliar, menjadikan dana desa sebagai sumber pendanaan utama dalam pembangunan wilayah ini.

Dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Lampung, Kabupaten Pringsewu memiliki karakteristik yang menonjol, yaitu kondisi sosial-ekonomi dan struktur pemerintahan desa yang homogen, baik dari segi kelembagaan, sumber pendapatan, maupun pola pembangunan. Desa-desa di Pringsewu sebagian besar berada dalam kawasan semi-perdesaan, di mana masyarakat masih menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan UMKM, tetapi mulai terbuka terhadap inovasi teknologi. Homogenitas ini sangat penting dari sisi metodologi, karena memberikan konsistensi antar objek penelitian dan meminimalisasi pengaruh variabel luar yang dapat mengganggu validitas data.

Dengan karakteristik yang seragam ini, perbandingan antar desa dalam hal pengaruh kompetensi SDM dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa menjadi lebih valid dan objektif. Selain itu, Kabupaten Pringsewu juga menjadi daerah yang menarik karena berada dalam proses transformasi digital dan peningkatan kapasitas SDM pemerintah desa, namun belum sepenuhnya merata implementasinya.

Dalam pengelolaan keuangan dana desa, pemerintah desa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 yang didalamnya mengatur pengelolaan dana desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa agar pengelolaan keuangan dana desa dilakukan secara transparan, akuntabel dan partisipatif serta tertib dan disiplin dalam anggaran. Dalam pengelolaan dana desa harus diimbangi dengan aspek tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yang salah satu azasnya yaitu akuntabilitas.

Akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten ini masih belum tercapai, dalam hal ini disebabkan karena kurangnya kompetensi sumber daya manusia atau aparatur desa yang menimbulkan tidak tercapainya akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pada beberapa desa informasi yang disediakan kepada publik mengenai penggunaan dana desa masih sangat minim, seperti tidak adanya papan informasi

yang jelas mengenai penggunaan dana desa. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan terkait dana desa.

Kabupaten Pringsewu merupakan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang sedang gencar melakukan pembangunan, yang tentunya juga menggiatkan pembangunan di tingkat desa dengan memanfaatkan alokasi dana desa yang bersumber dari APBN tersebut. Berdasarkan keterangan dari media, dana desa tahun 2016 naik hingga 100%. Kabupaten Pringsewu sendiri mendapatkan jatah dana desa sebesar Rp78 miliar pada 2016 dan 99,7 miliar pada tahun 2017. Dana itu rencananya dikucurkan pemerintah pusat ke 131 desa/pekon yang ada di Kabupaten Pringsewu pada bulan Maret.

Berikut adalah data alokasi dana desa tahun anggaran 2015-2017 dalam lingkup Nasional, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Pringsewu.

Tabel 1. Alokasi Dana Desa Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2015-2017

No.	Tahun Anggaran	Nasional	Provinsi Lampung	Kapubaten Pringsewu
1	2015	20.766.200.000.000	684.727.653.000	34.990.818.561
2	2016	46.982.080.000.000	1.536.762.050.000	78.159.651.000
3	2017	60.000.000.000.000	1.957.487.721.000	99.750.756.000
4	2018	60.000.000.000.000	1.900.000.000.000	100.250.000.000
5	2019	70.000.000.000.000	2.454.000.000.000	129.660.000.000
6	2020	71.000.000.000.000	2.454.000.000.000	129.660.000.000

Sumber : www.djpk.depkeu.go.id, (2020)

Berdasarkan data pada Tabel 1, dapat dilihat bahwa aliran dana desa Kabupaten Pringsewu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini tentunya menjadi perhatian tersendiri berkaitan dengan kemampuan pengelolaan dana desa yang begitu besar. Pasalnya apabila dalam pengelolaan dan pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang justru akan menimbulkan permasalahan baru. Oleh karena itu diperlukan pengawasan yang cukup intensif guna mengawal pelaksanaan dana desa sesuai dengan peruntukannya.

Persoalan lainya yang terdapat di Kabupaten Pringsewu terkait dengan pelaksanaan dana desa yaitu masih adanya penyimpangan penggunaan dana desa. Seperti Program Dana Desa di Pekon Sidodadi Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu, yang bersumber dari dana APBN dengan total anggaran Rp.

621.422.183 diduga penggunaannya tidak transparan. Hal tersebut terlihat dari beberapa pelaksana kegiatan seharusnya melibatkan kaur pembagunan namun sayangnya di Pekon Sidodadi Kaur Pembagunan tidak dilibatkan dan difungsikan. Kaur pembagunan tidak dilibatkan dalam penggunaan anggaran maupun pelaksana kegiatannya, bahkan tidak tahu di dusun mana saja yang harus dibangun, sedangkan dia adalah kaur pembagunan yang fungsinya untuk perencanaan kegiatan (Aryonno, 2019).

Selain itu terdapat tindakan penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh kepala pekon di Kabupaten Pringsewu lebih tepatnya di Kecamatan Adiluwih. Tindakan tersebut dilakukan pada tahun 2019 untuk keuntungan pribadi dengan melakukan pembelanjaan fiktif, membuat nota fiktif, markup harga barang dan mengurangi jumlah barang. (Lampung.antaraneews.com, 2022).

Kasus serupa juga terjadi di Kecamatan Sukoharjo dimana adanya indikasi penyalahgunaan dana desa tahun 2021, 2022, dan 2023, dimana hal ini mengakibatkan kerugian negara mencapai ratusan juta rupiah. Dalam laporan tersebut tersangka membuat nota fiktif, dan melakukan markup setiap belanja yang dilakukan menggunakan dana tersebut (Gemuruhnews.com, 2024).

Selain itu dilihat dari sisi pemanfaatan teknologi informasi kurang adanya pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes), dimana dengan menggunakan sistem ini seharusnya dapat mempercepat dalam sisi pelaporan karena tidak menggunakan cara-cara manual, dan meminimalisir terjadinya kecurangan maupun keterlambatan administrasi dalam merealisasikan dana desa. Sehingga hal ini juga dapat menjadi penilaian terhadap kemampuan kompetensi sdm pemerintahan kabupaten pringsewu dalam mengelola dana desa.

Berdasarkan isu diatas, ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dana desa diantaranya yaitu kompetensi SDM aparat desa dan pemanfaatan teknologi informasi. Kompetensi SDM menjadi faktor esensial karena kualitas pengelolaan dana sangat dipengaruhi oleh kemampuan, pengetahuan, serta integritas dari perangkat desa itu sendiri. Sementara itu, teknologi informasi kini menjadi alat pendukung utama dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dana desa, termasuk keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Beberapa penelitian tentang Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sudah banyak dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Alauddin (2020) yang berjudul Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal) menyatakan bahwa Kompetensi Aparatur dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif, sedangkan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh negatif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal.

Dengan demikian, penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh Kompetensi SDM Pemerintahan Desa Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa di Kabupaten Pringsewu).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi SDM pemerintah desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi SDM pemerintah desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan atau masukan tentang apakah terdapat pengaruh dari pemanfaatan teknologi informasi yang dijelaskan dalam teori *Technology Acceptance Model* (TAM) dan serta dalam teori Stewardship terkait dengan kompetensi sumber daya manusia (SDM) dan juga kewajiban melaksanakan pertanggungjawaban. Hal ini menjadi sangat penting mengingat telah ada pakem atau konsep baku yang diterapkan oleh pemerintah dan memahami faktor-faktor dengan hal tersebut adalah suatu keharusan.

2. Praktik

Secara Praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintahan dalam rangka memanfaatkan teknologi informasi dan senantiasa meningkatkan kompetensi SDM pemerintah desa dalam upaya mewujudkan akuntabilitas yang baik yang dilandasi dengan sikap kehati-hatian karena adanya sistem pengawasan yang juga berjalan. Hal ini menjadi sangat penting mengingat jumlah anggaran dana desa yang tidak sedikit sehingga membutuhkan tanggung jawab yang tinggi pula.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis

2.1.1 *Teori Technology Acceptance Model (TAM)*

Technology Acceptance Model (TAM) adalah model yang disusun oleh Davis pada tahun 1989 untuk menjelaskan penerimaan teknologi yang akan digunakan oleh pengguna teknologi. Dalam memformulasikan TAM, Davis menggunakan TRA sebagai dasar dalam menegakkan teorinya namun tidak mengakomodasi semua komponen teori TRA, hanya memanfaatkan komponen keyakinan dan sikap saja, sedangkan keyakinan normatif dan norma subjektif tidak digunakannya (Ramdhani, 2009).

TRA menjelaskan adanya reaksi dan persepsi pengguna Teknologi Informasi (TI) yang pada akhirnya akan mempengaruhi sikapnya dalam penerimaan terhadap teknologi tersebut. Tujuan utama TAM adalah memberikan penjelasan tentang penentuan penerimaan komputer secara umum, memberikan penjelasan tentang perilaku atau sikap pengguna dalam suatu populasi (Davis dkk., 1989).

TAM merupakan sebuah konsep yang dianggap paling baik dalam menjelaskan perilaku pengguna terhadap sistem teknologi informasi baru. TAM merupakan model yang dianggap paling tepat dalam menjelaskan bagaimana pengguna menerima sebuah sistem (Venkatesh & Davis, 2000). Menurut model TAM, minat (*intention*) pengguna suatu sistem dipengaruhi oleh persepsi tentang kegunaan teknologi (*perceived usefulness*) dan persepsi tentang kemudahan penggunaan teknologi (*perceived ease of use*).

Dan persepsi pemakai TI akan mempengaruhi sikapnya dalam penerimaan penggunaan teknologi informasi, yaitu salah satu faktor yang dapat mempengaruhi adalah persepsi pemakai atas manfaat dan kemudahan penggunaan

teknologi informasi sebagai suatu tindakan yang beralasan dalam konteks penggunaan teknologi informasi.

Model penelitian TAM dikembangkan dari berbagai perspektif teori. Pada awalnya teori inovasi difusi yang merupakan teori yang paling mendominasi penerimaan dan berbagai model penerimaan teknologi. Difusi adalah proses suatu informasi yang dikomunikasikan melalui saluran tertentu secara berkesinambungan kepada anggota dalam sebuah sistem sosial. Sedangkan inovasi adalah ide, praktek, atau objek yang dipersepsikan sebagai sesuatu yang baru oleh individu atau unit adopsi yang lain (Lui & Jamieson, 2003).

Model TAM bertujuan untuk menjelaskan determinan penerimaan pengguna terhadap suatu teknologi dan diharapkan dapat menjelaskan perilaku pengguna dalam cakupan luas pada pengguna akhir (Salisa et al., 2019). Dengan begitu, alur TAM berubah menjadi persepsi kebermanfaatan (*Perceived Usefulness*) dan persepsi kemudahan (*Perceived Ease Of Use*) langsung mempengaruhi niat perilaku untuk menggunakan (*Behavioral Intention To Use*). Pada akhirnya menunjukkan penggunaan nyata dari sistem (*Actual System Use*). Namun dinyatakan bahwa niat perilaku untuk menggunakan (*Behavioral Intention To Use*) dan penggunaan nyata dari sistem (*Actual System Use*) dapat digantikan oleh variabel penerimaan terhadap TI (*Acceptance Of IT*).

2.1.2 Teori Stewardship

Pada masa perkembangan akuntansi, pendekatan stewardship telah dipakai sebagai suatu pendekatan untuk menentukan titik berat utama dari suatu laporan keuangan, yang didasarkan kepada suatu konsep bahwa manajemen pada suatu perusahaan dianggap bertanggungjawab kepada pemilik untuk mengamankan kekayaan yang telah dipercayakan kepadanya. Pemilik bertindak sebagai prinsipal dan manajemen sebagai steward. Pendekatan ini berasal dari ilmu psikologi dan sosiologi yang didisain oleh para peneliti untuk membentuk suatu perilaku yang mengarah pada sikap melayani (*stewardship*).

Teori *stewardship* sangat berhubungan dengan konsep-konsep yang mencakup tentang model of man, behavioral, mekanisme psikologis (motivasi, identifikasi dan kekuasaan), dan mekanisme situasional yang mencakup

manajemen dan perbedaan kultur (Oktavianus & Rahman, 2019). Teori *stewardship* dibangun berdasarkan asumsi filosofi mengenai hakekat sifatsifat manusia yang dapat dipercaya, mampu bertindak dan bertanggungjawab, memiliki integritas dan kejujuran untuk kepentingan publik dan *stakeholder*. Selanjutnya teori *stewardship* juga mengasumsikann bahwa terdapat hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik, *steward* akan melindungi dan memaksimalkan kinerja orgnisasi, kepentingan pemilik.

2.1.3 Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang berbadan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Astuti & Yulianto, 2016). Salah satu upaya dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik berpusat pada prinsip akuntabilitas atau tanggung jawab dalam pengelolaan pemerintahan. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diatur berdasarkan PP nomor 7 tahun 1999.

Akuntabilitas juga dapat berarti sebagai perwujudan pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi, dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan dan dikuasai, dalam rangka pencapaian tujuan, melalui suatu media berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Sumber daya dalam hal ini merupakan sarana pendukung yang diberikan kepada seseorang atau unit organisasi dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas yang telah dibebankan kepadanya.

Wujud dari sumber daya tersebut pada umumnya berupa sumber daya manusia, dana, sarana prasarana, dan metode kerja. Sedangkan pengertian sumber daya dalam konteks negara dapat berupa aparatur pemerintah, sumber daya alam, peralatan, uang, dan kekuasaan hukum dan politik (Muslimah et al., 2023).

Diketahui juga bahwa akuntabilitas bukan hanya sebatas pada penyusunan laporan keuangan saja, tetapi sebagai upaya menguatkan akuntabilitas yang merupakan salah satu langkah penting dilakukan demi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Afriyanti et al., 2018). Akuntabilitas pemerintah dapat

dilihat dari dua bagian yakni akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja (Sardi et al., 2017). Akuntabilitas segi keuangan dan akuntabilitas segi kinerja mempunyai hubungan yang kuat dengan pengelolaan keuangan dan anggaran negara karena laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dibuat berdasarkan laporan keuangan sesuai yang diamatkan dalam PP Nomor 8 tahun 2006.

Adapun tujuan utama dari akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu:

1. Meningkatkan transparansi
2. Mencegah terjadinya korupsi
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat.

Akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk. Bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dana desa dapat bervariasi dan mencakup beberapa aspek. Secara umum, pertanggungjawaban ini ditujukan untuk memastikan penggunaan dana desa sesuai dengan perencanaan, transparan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Bentuk-bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dana desa antara lain:

- Akuntabilitas Fiskal: Meliputi penyusunan laporan keuangan yang transparan, realisasi anggaran sesuai dengan rencana, dan adanya mekanisme audit untuk memastikan pengelolaan keuangan yang baik.
- Akuntabilitas Program: Berfokus pada pencapaian target dan tujuan program yang telah ditetapkan. Pengelola dana desa harus dapat menunjukkan hasil yang konkret dari penggunaan dana tersebut.
- Akuntabilitas Proses: Menekankan pada keterbukaan informasi, partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan, serta adanya mekanisme pengaduan dan penyelesaian masalah.
- Akuntabilitas Hukum: Berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelola dana desa harus memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan yang ada.

Pratiwi & Setyowati (2017) mengungkapkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas dalam rana instansi pemerintah, sebaiknya memahami beberapa prinsip-prinsip penting yakni sebagai berikut ini:

1. Harus ada komitmen dan pimpinan dan seluruh staf instansi pemerintahan peril melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
2. Harus merupakan suatu system yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
5. Harus jujur, objektif, transparan, dan aktif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan tekoniK pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Akuntabilitas juga merupakan konsep yang berkaitan erat dengan pertanggungjawaban. Dalam konteks pengelolaan dana desa, akuntabilitas berarti bahwa pihak yang mengelola dana tersebut. Pertanggungjawaban pengelolaan dana desa biasanya dilakukan kepada beberapa pihak, antara lain:

1. Masyarakat Desa
Kepala desa dan perangkatnya harus melaporkan penggunaan dana kepada warga desa, karena mereka adalah pemangku kepentingan utama.
2. Pemerintah Daerah
Laporan pertanggungjawaban juga disampaikan kepada pemerintah daerah sebagai instansi yang mengawasi dan mengelola alokasi dana desa.

3. Badan Pengawas

Ada lembaga atau badan pengawas yang berfungsi untuk memastikan penggunaan dana desa sesuai dengan ketentuan yang ada.

4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD)

Pada tingkat provinsi atau kabupaten, dinas ini juga berperan dalam pengawasan dan evaluasi penggunaan dana desa.

5. Aparat Penegak Hukum

Jika terjadi penyimpangan, pertanggungjawaban juga dapat diminta oleh aparat penegak hukum.

2.1.4 Dana Desa

Prioritas pembanguna desa melalui dana desa menggeser pusat tata kelola pemerintahan dari pusat berpindah dan berkembang di daerah. Peningkatan kualitas pelyanan dan percepatan pembangunan serta pertumbuhan daerah menjadi tujuan utama perpindahan tata kelola pemerintahan. Pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah dituntut berorientasi pada kepentingan publik. Hal tersebut meliputi tuntutan pemerintah daerah untuk membuat laporan keuangan dan melakukan pengendalian atas anggaran publik. Penerapan akuntabilitas keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, akuntabilitas keuangan pada suatu instansi dapat mempengaruhi keberhasilan penerapan akuntabilitas kinerja (Rofika & Ardianto, 2014).

Berhasilnya akuntabilitas keuangan Dana Desa dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Namun di dalam pelaksanaannya bergantung pada bagaimna pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap keuangan Dana Desa itu sendiri. Dalam mendukung keterbukaan penyampaian informasi kepada masyarakat, setiap kegiatan yang dilaksanakan harus dipasang di papan informasi desa. Untuk mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas maka diperlukan kepatuhan pemerintah desa khususnya birokrasi desa dalam melaksanakan keuangan Dana Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Arifiyanto & Kurrohman, 2014).

2.1.5 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi adalah suatu teknologi untuk menghasilkan informasi yang relevan, strategis, akurat dan tepat waktu, untuk berbagai kepentingan adalah seperangkat komputer dan jaringan yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lain sesuai dengan kebutuhan dan fasilitas yang dibutuhkan (Regar et al., 2018).

Perubahan teknologi yang demikian canggih tentunya dapat berimplikasi positif dalam mendukung percepatan pembangunan di berbagai sektor kehidupan, dan dapat juga menjadi ancaman bagi berbagai sektor kehidupan. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi pada saat sekarang tentu bisa memberikan pengaruh besar dalam mendorong kinerja setiap sektor yang ada, tak terkecuali pada sektor pemerintahan desa.

Kemajuan ilmu dan teknologi informasi telah banyak mengubah cara pandang dan gaya hidup masyarakat Indonesia dalam menjalankan aktivitas dan kegiatannya. Tak terkecuali dalam ranah pemerintahan seperti pemerintah desa. Keberadaan dan peranan teknologi informasi dalam sistem pendidikan telah membawa era baru perkembangan dunia perekonomian, tetapi perkembangan tersebut tentu harus diimbangi dengan peningkatan sumber daya manusia yang menentukan keberhasilan dunia perekonomian di Indonesia pada umumnya.

Pola pikir perlu dibangun agar dapat mengikuti perkembangan TI yang sangat cepat. Pola pikir yang dimaksud adalah berpikir diluar kotak (*think out of the box*). Pada pola pikir ini dapat digambarkan bahwa dalam penyelesaian masalah menggunakan cara-cara yang mungkin belum dipikirkan oleh kebanyakan orang. Keberhasilan penggunaan teknologi informasi dalam hal ini ditentukan antara lain oleh persepsi pelaku dalam organisasi terhadap penggunaan teknologi informasi (Regar et al., 2018).

Dapat ditarik kesimpulan bahwa persepsi teknologi informasi merupakan suatu tingkat dimana penggunaan suatu teknologi akan mendatangkan manfaat bagi orang yang menggunakannya untuk meningkatkan kinerja, misalnya pada aparat desa yang mampu mengoperasionalkan teknologi informasi dengan baik tentu akan mampu meningkatkan kinerja pemerintah desa itu sendiri.

2.1.6 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor penting dalam meningkatkan produktifitas. Secara makro faktor-faktor masukan seperti sumber daya alam, material dan financial tidak akan memberi manfaat secara optimal untuk perbaikan kesejahteraan rakyat tanpa di dukung oleh ketersediaan faktor SDM yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas. Sumber daya manusia merupakan asset organisasi yang sangat vital, sehingga peran dan fungsinya tidak bisa di gantikan oleh sumber daya lainnya (Karyadi, 2019). Menurut Gordon (1988) manusia menjelaskan beberapa aspek yang terkandung dalam konsep kompetensi sebagai berikut: pengetahuan (*knowledge*), pemahaman (*understandig*), kemampuan (*skill*), nilai (*value*), sikap (*attitude*) dan minat (*interest*);

1. Kemampuan (*Skill*), adalah sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Misalnya, kemampuan karyawan dalam memilih metode kerja yang dianggap lebih efektif dan efisien.
2. Pengetahuan (*Knowledge*), yaitu kesadaran dalam bidang kognitif. Misalnya, seorang karyawan mengetahui cara melakukan identifikasi belajar, dan bagaimana melakukan pembelajaran yang baik sesuai dengan kebutuhan yang ada di perusahaan.
3. Pemahaman (*Understanding*), yaitu kedalaman kognitif, dan asfektif yang dimiliki oleh individu. Misalnya, seorang karyawan dalam melaksanakan pembelajaran harus mempunyai pemahaman yang baik tentng karakteristik dan kondisi kerja secara efektif dan efisien.
4. Sikap (*Attitude*), yaitu perasaan (senang-tidak senang, suka-tidak suka) atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datag dari luar. Misalnya, reaksi terhadap krisis ekonomi, perasaan terhadap kenaikan gaji, dan sebagainya.
5. Nilai (*Value*), adalah suatu standar perilaku yang telah diyakini dan secara psikologis telah menyatu dalam diri seseorang. Misalnya, standar perilaku para karyawan dalam melaksanakan tugas (kejujuran, keterbukaan, demokratis, dan lain-lain).

6. Minat (*Interest*), adalah kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Misalnya, melakukan suatu aktivitas kerja.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kompetensi sumber daya manusia (SDM) dapat diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki oleh individu sebagai dasar peningkatan kinerja organisasi. Sumber daya manusia dalam hal ini sebagai aktor yang berperan aktif dalam menggerakkan perusahaan/organisasi dalam mencapai tujuannya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Adanya penelitian-penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya berperan sangat penting dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan. Karena dengan adanya penelitian sebelumnya maka peneliti saat ini dapat terbantu dalam penulisan penelitian yang akan dihadapi. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang mendasari penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yesinia et al., (2018) dengan judul penelitian “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hasil penelitian ini menyatakan bahwa peran perangkat desa dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa yang ada pada Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Sari et al., (2017) dengan judul penelitian yaitu “Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Aparatur dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Manajerial Pengelolaan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Jaya”. Hasil penelitian menunjukan secara simultan pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi aparatur dan komitmen organisasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja manajerial pengelolaan keuangan. Sedangkan secara parsial bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi aparatur dan komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Alauddin (2020) dengan judul penelitian “Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal)”. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Kompetensi Aparatur dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif, sedangkan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh negatif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Karyadi (2019) dengan judul penelitian yaitu “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas keuangan Desa (Studi di Kecamatan Aikmel dan Kecamatan Lenek Tahun 2018)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi Tidak Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa. Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa. Secara simultan Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Raharja et al., (2020) dengan judul penelitian “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus di Desa Neglasari, Desa Cijangkar, Desa Bojongkalong, Desa Mekarsari, Desa Bojongsari dan Desa Kertaangsana Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi Jawa Barat)”. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan.

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Pemerintah Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang

dituntut oleh pekerjaan tersebut. Kompetensi merupakan landasan dasar karakteristik orang dan mengindikasikan untuk berperilaku atau berpikir, menyamakan situasi dan mendukung untuk periode waktu cukup lama. Pada konteks manajemen Sumber Daya Manusia, istilah kompetensi mengacu kepada atribut / karakteristik seseorang yang membuatnya berhasil dalam pekerjaannya. Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Kompetensi sumber daya manusia ini menjadi suatu keharusan, terlebih lagi SDM yang dalam hal ini adalah aparat desa harus bisa benar-benar mengayomi dan melayani masyarakat selaku steward (pelayan) dalam masyarakat sebagai mana yang telah dipaparkan dalam stewardship theory terkait dengan peranan melayani masyarakat.

Kompetensi sumber daya manusia (SDM) pada dasarnya memberikan berpengaruh positif dan signifikan dalam akuntabilitas keuangan dana desa (Karyadi, 2019). Hal yang sama diungkapkan dalam penelitian Raharja et al., (2020) dalam penelitiannya bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Dari apa yang telah dijelaskan tersebut memberikan gambaran bahwasanya kompetensi aparatur desa yang baik akan mengarahkan pengelolaan dana desa ke arah yang lebih akuntabel. Merujuk pada kesimpulan tersebut, peneliti kemudian merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Kompetensi Sumber Daya Manusia Pemerintah Desa berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

2.3.2 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Teknologi Informasi adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh manusia terhadap penerapan dalam kehidupan sehari-hari untuk membuat, mengubah, menyimpan dan mengkomunikasikan dan atau menyebarkan informasi. Munculnya berbagai macam teknologi baru telah membawa dampak yang sangat signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan untuk semua bidang yang ada,

tak terkecuali pada sektor pemerintahan (Rini, 2019). Pemanfaatan teknologi informasi yang baik dan benar serta didukung oleh keahlian personil yang mengoperasikannya dapat meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam teori TAM terkait dengan *intention to use* (kegunaan) yang menjadi sebuah kewajiban dari adanya penggunaan aplikasi. Keharusan ini seakan menjadi hal mutlak mengingat suatu sistem yang dikembangkan atau diterapkan harus memiliki kegunaan yang jelas dan terarah.

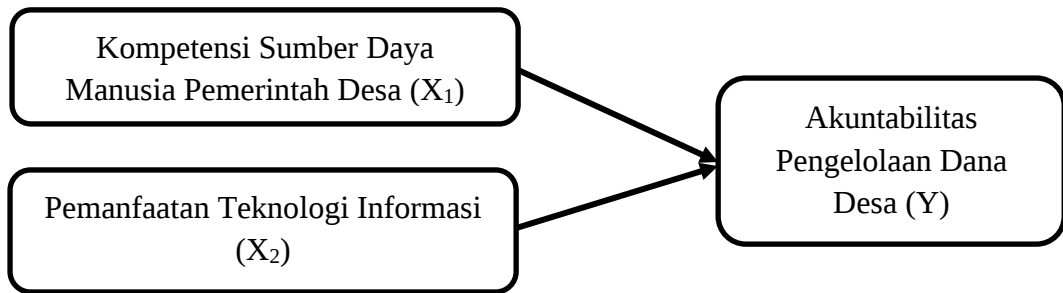
Hingga saat ini, penerapan sistem dan teknologi dalam pengelolaan dana desa masih harus dimaksimalkan agar bisa memberikan hasil signifikan dari pengaruh pemanfaatannya. Dalam penelitian Resfiana (2019) mengemukakan bahwa penerapan teknologi informasi bisa meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan secara signifikan jika dimanfaatkan secara maksimal. Hal yang sama juga di ungkapkan dalam penelitian yang di lakukan oleh Sari et al., (2017) yang menyatakan bahwa pemanfatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan daerah.

Hasil yang berbeda dikemukakan oleh Karyadi (2019) Pemanfaatan Teknologi Informasi Tidak Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa. Pemanfaatan teknologi informasi oleh setiap sektor baik bisnis ataupun pemerintahan untuk membantu mengadministrasikan pengelolaan keuangan secara efisien dan efektif. Merujuk kepada apa yang telah diuraikan, peneliti kemudian merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

2.4 Kerangka Berfikir

Berdasarkan judul yang peneliti teliti yaitu “Pengaruh Kompetensi SDM Pemerintah Desa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”. Maka kerangka berpikir penelitian ini dapat digambarkan dengan:



Gambar 1 Kerangka Befikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian adalah hal yang menjadi pokok persoalan untuk kemudian diamati dan diteliti. Adapun objek penelitian yang peneliti akan teliti dalam hal ini dilakukan pada desa se-Kabupaten Pringsewu.

3.2 Populasi dan Sampel

1. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa di Kabupaten Pringsewu yang berjumlah 1.048 orang. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan *purposive random sampling*. Teknik pengambilan sampel dengan kriteria tertentu sesuai tujuan penelitian dan dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.

Adapun kriteria *purposive random sampling* yaitu:

- 1) Teknik ini digunakan jika elemen populasi bersifat homogen, sehingga elemen manapun yang terpilih menjadi sampel dapat mewakili populasi.
- 2) Dilakukan jika analisis penelitiannya cenderung deskriptif dan bersifat umum.
- 3) Sampel dalam penelitian ini yaitu hanya perangkat desa yang menjabat sebagai kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, kaur perencanaan, kaur tata usaha dan umum, kasi pemerintahan, kasi kesejahteraan, dan kasi pelayanan.

Karakteristik sampel yang diharapkan identik dengan populasi kemungkinan besar bisa didapat melalui penentuan sampel yang benar-

benar acak. Hal ini berarti tidak ada kepentingan apapun yang bisa mempengaruhi penentuan sampel termasuk kepentingan peneliti sendiri.

Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili) (Sugiyono, 2017).

Dalam penelitian ini menggunakan rumus *slovin* (Sugiyono, 2017). Alasan menggunakan rumus ini karena dalam penarikan sampel jumlahnya harus *representative* (mewakili populasi) agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan (membuat suatu gagasan lebih sederhana dari yang sebenarnya) (Bunnaja, 2019), rumus *slovin* sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 n &= \frac{N}{1 + Ne^2} \\
 &= \frac{1.048}{1 + (1.048) (0,1)^2} \\
 &= \frac{1.048}{11,48} \\
 &= 91,289 \text{ dibulatkan menjadi } 91
 \end{aligned}$$

Dimana :

$$\begin{aligned}
 n &= \text{Sampel} \\
 N &= \text{Jumlah populasi} \\
 e &= \text{Toleransi kesalahan}
 \end{aligned}$$

Dalam rumus slovin, jika populasi lebih dari 1000 maka batas toleransi eror menggunakan 10%. Sehingga sampel pada penelitian ini di dapat 91 responden. Sampel penelitian ini adalah kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, kaur perencanaan, kaur tata usaha dan umum, kaur kesejahteraan, kaur seksi pelayanan, dan kaur seksi pemerintahan.

3.3 Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data subjek. Data subjek adalah jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subjek penelitian (responden). Data subjek merupakan data penelitian yang dilaporkan sendiri oleh responden secara individu atau kelompok. Data subjek yang diperoleh diklasifikasikan berdasarkan bentuk tanggapan (respon) yang diberikan yaitu respon tertulis karena tanggapan atas pernyataan tertulis (kuesioner) yang diajukan oleh peneliti.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari pihak pertama. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya dan tidak melalui media perantara. Data primer merupakan data utama yang akan peneliti gunakan dalam menyelesaikan penelitian ini, yang diperoleh langsung dari sumber asli dan data diperoleh melalui survei kepada responden. Data primer dalam penelitian ini adalah tanggapan yang akan dijawab langsung oleh subjek penelitian melalui kuesioner. Adapun sumber data primer penelitian diperoleh dari informan yang telah dikonfirmasi sebelumnya yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Perangkat-perangkat Desa lainnya.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dengan menggunakan kuesioner, dimana kuesioner merupakan bentuk daftar pernyataan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya yang akan dijawab oleh responden, dimana sudah disediakan alternatif jawaban atas pernyataan yang disediakan sehingga responden tinggal memilih. Untuk memperoleh data yang sebenarnya, kuesioner diberikan secara langsung oleh

peneliti dengan cara membagikan kepada responden sesuai dengan jumlah yang ditentukan.

Responden diminta untuk mengisi daftar pernyataan tersebut, kemudian peneliti akan mengambil angket yang telah diisi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis instrumen angket atau kuesioner dengan penetapan skor yaitu sebagai berikut:

- | | | | |
|----|-----|-----------------------|--------------|
| 1. | SS | : Sangat Setuju | Nilai skor 4 |
| 2. | S | : Setuju | Nilai skor 3 |
| 3. | TS | : Tidak Setuju | Nilai skor 2 |
| 4. | STS | : Sangat Tidak Setuju | Nilai skor 1 |

3.5 Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Independen.

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kompetensi SDM Pemerintah Desa (X1), dan Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2).

a. Kompetensi SDM Pemerintah Desa

Kompetensi pemerintah desa merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh setiap aparatur desa dalam mengemban tugas serta kewajiban yang ditanggungnya dalam penyelenggaraan urusan pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) serta dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Adapun indikator kompetensi sumber daya manusia dalam penelitian ini mencakup kemampuan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman (Andriani, 2021).

b. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku/sikap menggunakan teknologi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerjanya. Pemanfaatan teknologi informasi

merupakan manfaat yang diharapkan oleh pengguna sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya atau perilaku dalam menggunakan teknologi pada saat melakukan pekerjaan. Adapun indikator pemanfaatan teknologi informasi dalam penelitian ini yaitu proses komputerisasi dan ketersediaan jaringan internet (Alauddin, 2020).

2. Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan suatu bentuk variabel terikat yang dipengaruhi oleh variabel lain, namun pada variabel dependen ini tidak dapat mempengaruhi variabel-variabel yang lain. Dengan kata lain variabel terikat ini merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (variabel independen). Sehingga, variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y).

a. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Menurut Arfiansyah (2023) akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan melalui media pertanggungjawaban secara periodik. Instansi pemerintah wajib melakukan pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan keuangannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang didasarkan pada perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Adapun indikator akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam penelitian ini yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban (Alauddin, 2020).

3.6 Teknik Analisis Data

Metode analisis data adalah kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain telah terkumpul. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif merupakan suatu analisis yang diperuntukkan bagi data yang besar yang dikelompokkan ke dalam kategori-kategori yang berwujud angka-angka (Sugiyono, 2017). Teknik analisis kuantitatif yaitu suatu bentuk penelitian berdasarkan data yang dikumpulkan selama penelitian secara sistematis mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari objek yang diteliti dengan menggunakan hubungan antar variabel yang terlibat didalamnya (Sugiyono, 2017). Metode analisis data menggunakan statistik kausal komparatif, uji kualitas data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis dengan bantuan komputer melalui program SPSS.

3.6.1 Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2017). Data primer yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner dibentuk dalam skala pengukuran. Dalam penelitian ini skala pengukuran yang digunakan adalah skala likert. Untuk analisis data kuantitatif, maka jawaban responden diberi skor sebagai berikut:

1 = Sangat tidak setuju

2 = Tidak setuju

3 = Setuju

4 = Sangat setuju

Kemudian data jawaban tersebut akan menghasilkan data ordinal.

3.6.2 Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukur (tes) dalam melakukan fungsi ukurnya (Sugiyono, 2017). Uji validitas dimaksudkan

untuk mengukur kuesioner yang digunakan sebagai instrument penelitian sehingga dapat dikatakan instrument tersebut valid (Sugiyono, 2017). Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Khairi 2019). kriteria pengujian validitas adalah sebagai berikut :

1. Jika r hitung positif dan r hitung $> r$ tabel maka butir pernyataan tersebut adalah valid
2. Jika r hitung negatif dan r hitung $< r$ tabel maka pernyataan tersebut tidak valid

2. Uji Reabilitas

Reabilitas berasal dari kata reability berarti sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Suatu hasil pengukuran dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subyek yang sama, diperoleh hasil pengukuran yang relatif sama, selama aspek yang diukur dalam diri subyek memang belum berubah (Sugiyono, 2017). Uji reabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Sari, 2020). Butir kuesioner dikatakan reliabel (layak) jika cronbachs alpha $> 0,6$ dan dikatakan tidak reliabel jika cronbachs alpha $< 0,6$ (Sugiyono, 2017).

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

Uji ini dilakukan untuk mengetahui bahwa data yang diolah adalah sah (tidak terdapat penyeimbang) serta distribusi normal, maka data tersebut akan diuji melalui uji asumsi klasik (Sugiyono, 2017), yaitu :

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas dengan tujuan untuk dapat mengetahui bahwa data yang ada terdistribusi normal dan independen (Sugiyono, 2017).. Uji t dan f mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal, kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid (Sugiyono, 2017). Salah satu cara

untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik. Analisis grafik dapat dilakukan dengan: (a) melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal, dan (b) normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk garis lurus diagonal, dan plotting data residual normal. Maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Sugiyono, 2017).

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas merupakan keadaan dimana ada hubungan linier secara sempurna atau mendekati sempurna antara variabel independen dalam model regresi (Sugiyono, 2017). Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independent). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal (Sugiyono, 2017).

Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Salah satu cara mengetahui ada tidaknya multikolinearitas pada suatu model regresi adalah dengan melihat nilai tolerance dan VIF (Variance Inflation Factor). (1) Jika nilai tolerance $> 0,10$ dan $VIF < 10$, maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat multikolinearitas pada penelitian tersebut. (2) Jika nilai tolerance $< 0,10$ dan $VIF > 10$, maka terjadi gangguan multikolinearitas pada penelitian tersebut (Adnovaldi 2019).

c. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu dengan periode t dengan kesalahan periode $t-1$ (sebelumnya) yang berarti kondisi saat ini dipengaruhi oleh kondisi sebelumnya dengan kata lain autokorelasi sering terjadi pada data time series. Data yang baik adalah data yang tidak terdapat autokorelasi di dalamnya. Uji yang digunakan untuk mendeteksi apakah ada autokorelasi adalah runs test.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas adalah varian residual yang tidak sama ada semua pengamatan di dalam model regresi dimana regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heteroskedastisitas (Sugiyono, 2017). Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi ketidaksamaan variance dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas (Sugiyono, 2017).

Model regresi yang baik adalah model regresi homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk menguji heteroskedastisitas dengan cara uji Glejser. Uji Glejser adalah uji hipotesis untuk mengetahui apakah sebuah model regresi memiliki indikasi heteroskedastisitas dengan cara meregres absolut residual. (Sugiyono, 2017).

3.7 Uji Hipotesis

1. Analisis Regresi Linear Berganda

Pengujian hipotesis terhadap pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis regresi digunakan untuk memprediksi pengaruh lebih dari satu variabel bebas terhadap satu variabel tergantung, baik secara parsial maupun simultan.

Rumus untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

α = Konstanta

X1 = Kompetensi Sumber Daya Manusia Pemerintah Desa

X2 = Pemanfaatan Teknologi Informasi

$\beta_1 - \beta_2$ = Koefisien regresi berganda

e = Error Term

2. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dapat menjelaskan Variabilitas variabel dependen melalui adjusted R^2 yang memiliki nilai antara 0 sampai dengan 1 (Sugiyono, 2017). Untuk mengetahui seberapa jauh variabel bebas pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap akuntabilitas alokasi dana desa. Nilai R^2 mempunyai interval antara 0 sampai dengan 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Jika nilai R^2 bernilai besar (mendekati 1) berat variabel bebas dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Sedangkan variabel dependen sangat terbatas.

3. Uji t (Uji Parsial)

Ghozali (2017) menyatakan bahwa uji t atau t-test digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan uji t, yaitu membandingkan antara t hitung dengan t table, uji ini dilakukan dengan menentukan nilai *Level of Significance* dimana yang digunakan sebesar 5% atau (α) = 0,05. Pengujian ini dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

- Jika signifikan nilai $t \leq 0,05$ maka hipotesis diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
- Jika signifikansi nilai $t > 0,05$ maka hipotesis ditolak atau tidak dapat diterima. Hal ini menunjukkan variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan temuan hasil analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Simpulan tersebut ditunjukkan dari temuan-temuan hasil analisis sebagai berikut:

1. Kompetensi Sumber Daya Manusia mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pemerintah Kabupaten Pringsewu. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkat kompetensi sumber daya manusia semakin baik akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Pringsewu. Aparatur desa berkewajiban dalam mengelola dana desa yang ada.
2. Pemanfaatan Teknologi Informasi mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pemerintah Kabupaten Pringsewu. Hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya kemampuan dalam pemanfaatan teknologi informasi maka semakin baik akuntabilitas pengelolaan dana desa yang ada di Kabupaten Pringsewu.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian diatas adapun beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Peneliti tidak dapat memberikan kuesioner secara langsung kepada responden dan mendampingi responden dalam mengisi kuesioner. Hal ini disebabkan oleh kesibukan responden dan kendala dengan lokasi.

Semua responden tidak dapat menyanggupi untuk menjawab kuesioner secara langsung dan meminta waktu hingga dua minggu. Kendala ini menyebabkan tidak dapat diketahui apakah responden benar-benar mengisi kuesioner dengan baik. Juga, peneliti tidak dapat secara langsung menjawab hal-hal yang tidak diketahui oleh responden terkait pertanyaan yang ditanyakan dalam kuesioner.

2. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam penggunaan teori *Technology Acceptance Model* (TAM) sebagai dasar analisis variabel pemanfaatan teknologi informasi. Hasil menunjukkan bahwa TAM kurang sesuai diterapkan dalam konteks desa di Kabupaten Pringsewu.
3. Variabel yang diteliti masih dirasa belum cukup untuk mengukur akuntabilitas pengelolaan dana desa, sehingga untuk penelitian lebih lanjut perlu menambahkan variabel lain.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka saran yang diberikan dalam penelitian ini berikut:

1. Penelitian ke depannya diharapkan mampu mengembangkan jumlah sampel demi hasil penelitian yang jauh lebih spesifik.
2. Penelitian ke depannya diharapkan untuk mempertimbangkan penggunaan teori alternatif selain *Technology Acceptance Model* (TAM).
3. Penelitian ke depannya diharapkan mampu mengembangkan jumlah atau variasi variabel terutama pada sisi variabel moderasi guna melihat pemoderasi mana yang paling baik dalam mengelevasi akuntabilitas dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriyanti, D., Sabanu, H. G., & Noor, F. (2018). Penilaian Indeks Akuntabilitas Instansi Pemerintah. *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 21–42. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v1i1.10>
- Alauddin, F. C. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Pancasakti*.
- Arfiansyah, M. A. (2023). Pengaruh Sistem Keuangan Desa Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(1), 130–136. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i1.5963>
- Arifiyanto, D. F., & Kurrohman, T. (2014). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember*. 2(3), 473–485.
- Asmawati. (2020). Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Lpm) Dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Ranga Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang). *Education*, 6.
- Astuti, T. P., & Yulianto, Y. (2016). Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.20473/baki.v1i1.1694>
- Aziiz, N. M., dan Prastiti, D. S. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6(2), 334–344.
- Bunnaja, Rajab (2019) Pengaruh Faktor Religiusitas, Pribadi, Dan Pelayanan Terhadap Minat Menabung Di Bank Syariah (Studi Kasus Pada Mahasiswa Uin Raden Fatah Palembang). *Jurnal UIN Raden Fatah*
- Ghozali, I. (2017). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Gordon. (1988). *Pembelajaran Kompetensi*. Jakarta (ID): Rineka Cipta.
- Gujarati, D. (2012). *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Jakarta: Salemba.

- Jamaluddin, Y. (2017). Analisis Terhadap Indikator Pengukuran Akuntabilitas Kinerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara - 2015. *Jurnal TAPIS*, 14(1), 74–86.
- Karyadi, M. (2019). Pengaruh sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas keuangan desa (studi di Kecamatan Aikmel dan Kecamatan Lenek tahun 2018). *Journal Ilmiah Rinjani*, 7(2), 33–46. <https://jurnal.ugr.ac.id/index.php/jir/article/view/123>
- Lui, H. K., & Jamieson, R. (2003). Integrating Trust and Risk Perceptions in Business-to-Consumer Electronic Commerce with the Technology Acceptance Model. *16th Bled Electronic Commerce Conference, Slovenia, January 1993*, 349–364.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- Moeheriono. (2018). *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muslimah, W., Taufik, T., & Rusli, R. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Sistem Pelaporan, Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, 18(1), 1–15. <https://doi.org/10.37301/jkaa.v18i1.99>
- Nurillah, A. S. (2014). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia , Penerapan Sistem Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok). *Skripsi Universitas Diponegoro*, 3, 1–70.
- Oktavianus, P., & Rahman, F. A. (2019). Teori Stewardship tinjauan konsep dan implikasinya organisasi sektor publik. In *Jurnal Bisnis dan Akuntansi* (Vol. 3, Issue 2, pp. 419–432).
- Pratiwi, R. D., & Setyowati, L. (2017). Determinan Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Semarang. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 24(1), 94–102.
- Raharja, A. D., Suherman, A., & Alamsyah, S. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus Di Desa Neglasari, Desa Cijangkar, Desa Bojongkalong, Desa Mekarsari, Desa Bojongsari Dan Desa Kertaangsana Kecamatan Nyalindung Kab. Sukabumi Jawa Barat). *Prosiding Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi*, September, 68–77. <https://proceeding.unpkediri.ac.id/index.php/senmea/article/view/231>
- Ramdhani, N. (2009). Model Perilaku Penggunaan Tik “NR2007” Pengembangan Dari Technology Acceptance Model (TAM). *Buletin Psikologi*, 17(1), 17–27.

- Regar, T. A., Areros, W. A., & Asaloei, S. I. (2018). Persepsi Karyawan Terhadap Penggunaan Teknologi Informasi Pada Hotel Sintesa Peninsula Manado. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 6(2), 34–40.
- Resfiana. (2019). Pengaruh Penerapan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Aparatur Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari. *Journal Of Education On Social Science*.
- Rini, Y. (2019). Mengurai Peta Jalan Akuntansi Era Industri 4.0. *Referensi : Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi*, 7(1), 58. <https://doi.org/10.33366/ref.v7i1.1339>
- Rofika, & Ardianto. (2014). Pengaruh Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pa. *Jurnal Akuntansi*, Vo. 2 No.2, 197–209.
- Salisa, N. R., Aeni, I. N., & Chamid, A. A. (2019). Analisis Faktor-faktor Penerimaan Penggunaan Sistem Keuangan Desa: Pendekatan TAM dan TPB. *Ekonomi Dan Bisnis*, 6(1), 34–53. <https://doi.org/10.35590/jeb.v6i1.829>
- Sardi, S. J., Rifa'i, H. A., & Husnan, L. H. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Satker Balai Besar Bmkg Wilayah Iii Denpasar-Bali). *InFestasi*, 12(2), 158. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v12i2.2771>
- Sari, M., Basri, H., & Indriani, M. (2017). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Aparatur dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Manajerial Pengelolaan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Jaya. *Jurnal Megister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 6(2), 67–73.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syahputra, I., & Jufrizen, J. (2019). Pengaruh Diklat, Promosi, Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai. *Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, 2(1), 104–116. <https://doi.org/10.30596/maneggio.v2i1.3364>
- Venkatesh, V., & Davis, F. D. (2000). Theoretical extension of the Technology Acceptance Model: Four longitudinal field studies. *Management Science*, 46(2), 186–204. <https://doi.org/10.1287/mnsc.46.2.186.11926>
- Yesinia, N. I., Yuliarti, N. C., & Puspitasari, D. (2018). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus pada Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang). *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 10(1), 105–112. <https://doi.org/10.17509/jaset.v10i1.13112>